

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Herdiansyah, H. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Miles MB, H. (2009). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nawawi, H. (1998). *Metode Peneliti Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soehartono, I. (1998). *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Roskadaya.
- Keban, Y. T. (2011). *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Koentjaraningrat. (2008). *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mardalis, D. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suyanto, B. (2007). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal :

- Astuti, R. M. (2013). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN FUNGSI PEMERIKSAAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan).
- FAUZA, N. A. (2017). ASPEK HUKUM TANAH MAGERSARI DI KERATON YOGYAKARTA (STUDI ATAS STATUS TANAH KERATON DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA).

- Risnawati, D. (2017). PENGELOLAAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DI DESA KRAYAN BAHAGIA KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER, 5(1), 199–212.
- Taufik, T. (2007). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
- Setiawan, W. (2012). PENGARUHAKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. 17-18.
- Amalia, S. H. (2017). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (STUDI KASUS PADA OPD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, OPD PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Peraturan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No 13 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Peraturan Desa No 01 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Desa yang Digunakan untuk Tanah Kas Desa, Pelungguh/ bengkok dan Pengarem Arem.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Website :

<http://eprints.umm.ac.id> di akses pada tanggal 26 juni 2019